

**LAPORAN PELAKSANAAN URUSAN KEUANGAN DAN
BARANG MILIK NEGARA**

TRIWULAN II



**PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

2023

PENDAHULUAN

Pembangunan pertanian memerlukan sebuah standar instrumen pertanian demi menjamin mutu dari proses dan produk hasil pertanian. Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) lahir pada 21 September 2022 melalui Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 untuk merumuskan dan mengkoordinasikan standar instrumen pertanian, serta untuk mengharmonisasikan penerapan dan pemeliharaan standar instrumen pertanian. Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PSIPKH) sebagai salah satu unit Eselon-2 dari BSIP, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan Pengelolaan Keuangan, Perlengkapan dan BMN pada PSIPKH adalah kegiatan ketatausahaan termasuk di dalamnya pengelolaan anggaran dan pengelolaan Barang Milik Negara, serta melakukan pengawasan atas tertib administrasi pelaksanaannya agar kebijakan yang telah digariskan bisa mencapai tujuan berdasarkan pada prinsip-prinsip pelaksanaan anggaran belanja negara antara lain taat pada peraturan perundang-undangan, tidak mewah, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan mencakup kegiatan perencanaan, penggunaan, pengawasan dan pertanggungjawaban berdasarkan prinsip pengelolaan Barang Milik Negara yang dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabel, dan kepastian nilai.

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah perlu disampaikan tepat waktu dan disusun mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang terdiri dari Sistem Akuntansi Pusat (SAP) yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) yang dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga.

TUJUAN

1. Melaksanakan kegiatan pencatatan dan pengelolaan Barang Milik Negara dengan menggunakan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN);
2. Penatausahaan keuangan, perlengkapan dan PNBPN;
3. Melakukan pembayaran Gaji dan Tunjangan tepat waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Realisasi Belanja Satuan Kerja PSIPKH

Pada Tahun 2023 Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan mendapatkan pagu awal sebesar Rp 7.425.579.000 yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai sebesar Rp 2.846.379.000 dan Belanja Barang sebesar Rp 4.579.200.000, Belanja Barang dibagi menjadi dua yaitu Belanja Operasional sebesar Rp 3.469.200.000 dan Belanja Non Operasional sebesar Rp 1.110.000.000.

Pada tanggal 10 April 2023 telah dilakukan revisi anggaran kedua dimana Total Pagu bertambah menjadi Rp 9.711.579.000, Belanja Non Operasional sebesar Rp 3.096.000.000 dan Belanja Modal sebesar Rp 300.000.000. Pada saat itu juga telah dibuka pagu yang berbintang. Sedangkan revisi anggaran ketiga terjadi pada tanggal 15 April 2023 dimana Total Pagu menjadi Rp 10.011.579.000, terjadi penambahan sebesar Rp 300.000.000 untuk kegiatan Pendampingan Kegiatan Pekan Nasional. Tanggal 30 Mei 2023 revisi anggaran keempat dimana terjadi perubahan pagu anggaran pada kegiatan Penyebarluasan Hasil Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Peningkatan Kemanfaatan Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pengelolaan Informasi Peternakan dan Veteriner dan Pengelolaan Sistem Pengendalian Intern untuk Mendukung Pembangunan Zona Integritas.

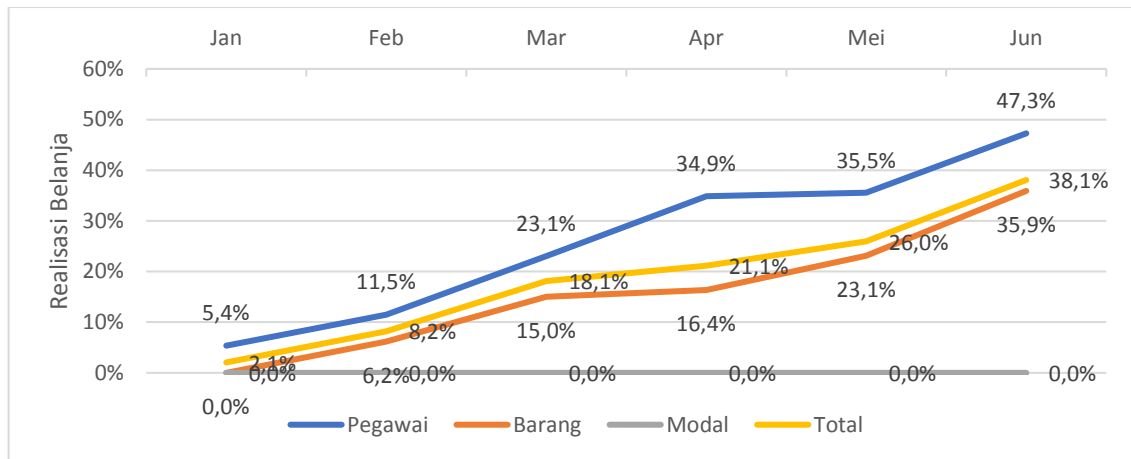
Realisasi Belanja pada PSIPKH sesuai dengan OmSpan per 30 Juni 2023 mencapai 38,07% atau sebesar Rp 3.811.258.183 dari total pagu Rp 10.011.579.000, dimana telah dibelanjakan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Barang, sebagaimana disajikan pada Tabel 1. Adapun realisasi belanja sesuai dengan Kartu Pengawasan (Karwas) per 30 Juni 2023 sebesar Rp 4.071.069.608 dari total pagu Rp 10.011.579.000 atau 40,66%. Selisih realisasi karwas dibanding OmSpan karena terdapat realisasi definitif sebesar Rp 259.811.425 terdiri atas Gaji Induk bulan Juli 2023 sebesar Rp 145.455.655 dan Honor PPNPN bulan Juni 2023 sebesar Rp 73.800.000.

Tabel 1. Realisasi OmSpan per 30 Juni 2023

NO	KODE/NAMA KEGIATAN	KETERANGAN	JENIS BELANJA			TOTAL
			PEGAWAI	BARANG	MODAL	
1	1809 Dukungan Manajemen. Fasilitasi dan Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian	PAGU	2.846.379.000	6.865.200.000	300.000.000	10.011.579.000
		REALISASI	1.345.627.950	2.465.630.233	0	3.811.258.183
			(47,28%)	(35,91%)	(0,00%)	(38,07%)
		SISA	1.500.751.050	4.399.569.767	300.000.000	6.200.320.817

Perkembangan realisasi per jenis belanja PSIPKH disajikan pada Gambar 1. Semua jenis belanja realisasinya masih di bawah 50% meskipun tahun anggaran sudah

berjalan satu semester. Realisasi belanja pegawai (47,28%) menunjukkan sudah mendekati normal, dengan sedikit keterlambatan pada pembayaran belanja lembur mengingat bahwa pembayaran lembur bulan Juni baru bisa ditagihkan pada bulan Juli.

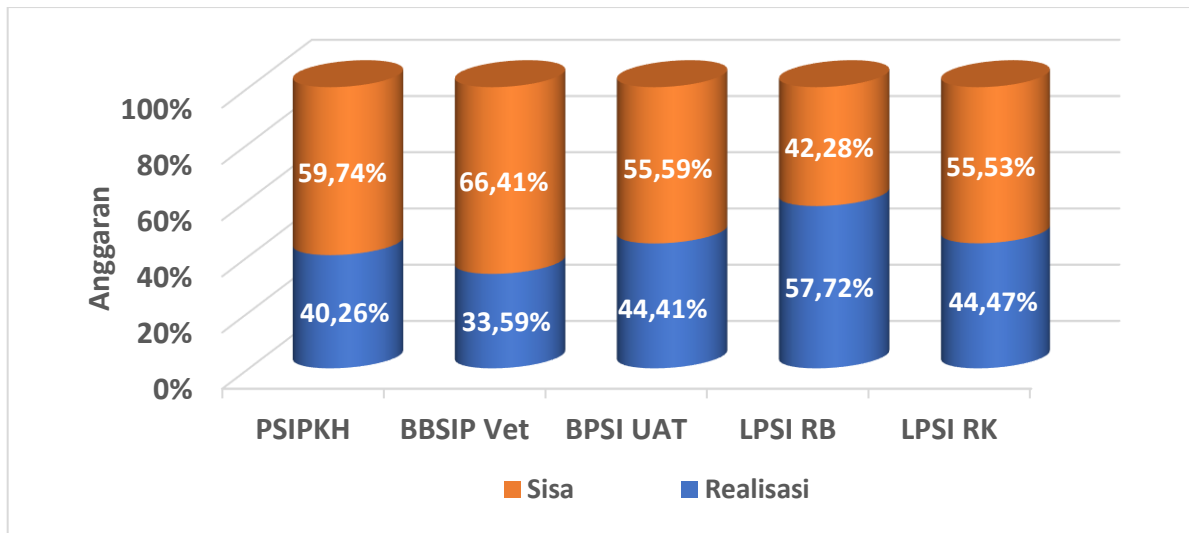


Gambar 1. Perkembangan realisasi per jenis belanja PSIPKH per 30 Juni 2023

Realisasi belanja barang baru mencapai 35,91% dikarenakan terkait proses pengalihan Komisi Teknis dari Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) ke BSIP, dalam hal ini PSIPKH, sehingga kegiatan yang sudah berjalan masih dibiayai dengan anggaran Ditjen PKH. Adapun belanja modal belum dilaksanakan sama sekali karena sedang dalam proses revisi DIPA/POK yang kemudian harus diikuti dengan revisi SIRUP.

2. Realisasi Belanja Satker Lingkup PSIPKH

Realisasi belanja satker lingkup PSIPKH sampai dengan 30 Juni 2023 mencapai 56,55%, dengan rincian per satker seperti terlihat pada Gambar 2. LPSIRB secara konsisten telah menunjukkan kinerja realisasi paling baik dengan capaian 57,72%. Adapun realisasi belanja terendah dicapai oleh BSIP Veteriner sebesar 33,59%.



Gambar 3. Realisasi belanja satker lingkup PSIPKH per 30 Juni 2023

3. Usulan Penetapan Status Penggunaan BMN

Menindaklanjuti Surat usulan Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN berupa selain Tanah dan/atau Bangunan pada Satker Loka Penelitian Sapi Potong dari Plt. Kepala Loka Penelitian Sapi Potong Nomor 816/PL.210/H.5.4/04/2023 tanggal 13 April 2023, disampaikan bahwa Loka Penelitian Sapi Potong bermaksud mengusulkan Penetapan Status Penggunaan BMN berupa Peralatan dan Mesin yang tidak memiliki bukti kepemilikan dan digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi, dengan nilai perolehan seluruhnya sebesar Rp 38.500.000 (Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), mengingat nilai perolehan per unit barang dibawah Rp 100.000.000 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 4/PMK.06/2015 BAB II Paragraf 1 Pasal 4 (1) a kewenangan Penetapan Status Penggunaan adalah Pengguna Barang dalam hal ini Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian.

4. Pemanfaatan BMN

Pemanfaatan aset merupakan salah satu upaya pengelolaan BMN untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Pada bulan Juni telah dilakukan peninjauan kerjasama pemanfaatan aset pada PSIPKH yakni berupa sewa tanah dan atau bangunan, yang tidak digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas PSIPKH, yaitu:

- a. Peninjauan penyewaan aset tanah untuk digunakan membangun menara *base transceiver station* (BTS) oleh PT Protelindo. Pihak ketiga telah melakukan survei lokasi untuk penempatan bangunan BTS di atas tanah PSIPKH, di luar pagar emplesemen kantor. Proses selanjutnya adalah menunggu permohonan tertulis dari calon penyewa untuk dapat diproses lebih lanjut

- b. Penjajagan penyewaan bangunan kantin oleh Jaware Cafe. Terhadap hal ini juga telah dilakukan peninjauan lokasi, untuk selanjutnya menunggu permintaan tertulis dari calon penyewa guna dapat diproses lebih lanjut.

5. Penghapusan BMN

Menindaklanjuti Surat usulan PSP dari Plt. Kepala Loka Penelitian Sapi Potong Nomor 722/PL.320/H.5.4/03/2023 tanggal 29 Maret 2023 tentang Permohonan Penetapan Keputusan Penghapusan Hibah Barang Milik Negara, disampaikan bahwa Loka Penelitian Sapi Potong bermaksud mengusulkan permohonan penetapan penghapusan Hibah BMN berupa Sapi Potong sejumlah 88 ekor dengan nilai perolehan sebesar Rp. 219.656.225 (Dua Ratus Sembilan Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Rupiah), dimana telah dilakukan hibah kepada 15 Dinas/Stateholder sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang tata cara pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara serta Peraturan Menteri Keuangan 83/PMK.06/2016 tentang tata cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara. Adapun kelengkapan dokumennya antara lain daftar hibah BMN yang akan dihapuskan, fotokopi Persetujuan Hibah BMN dan fotokopi naskah hibah sapi potong dan Berita Acara Serah Terima Sapi Potong.

6. Monitoring Asset BMN dan koordinasi kelembagaan

Pada tanggal 11 – 13 Mei 2023 PSIPKH melaksanakan Monitoring BMN pada LPSI Ruminansia Besar Grati, Jawa Barat. Hasil monitoring antara lain sbb:

Tindak lanjut rekomendasi hasil monev Juli 2022 :

- a. Tanah LPSIRB (Tanah Kebun Percobaan) yang terletak di Desa Gratitunon seluas 94.517 m² dan Desa Sumberagung seluas 48.380 m² disarankan untuk dilakukan pemagaran dalam rangka pengamanan aset. Sampai saat ini pemagaran di KP Gratitunon belum berupa pagar permanen (masih dengan kawat duri), sedangkan di KP Sumberagung sudah ada pemagaran sebagian.
- b. Tanah LPSIRB NUP 2 seluas 67.800 m² tercatat di BMN sebagai Tanah Kebun Percobaan (2010203003). Disarankan direklasifikasi menjadi Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (2010104001) sebab di atas tanah tersebut adalah bangunan kantor. Reklasifikasi belum dilakukan, namun telah dilakukan pembaharuan sertifikat menjadi Atas Nama Permerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertanian.

- c. Di SIMAK BMN LPSIRB tercatat 3 NUP Jalan Desa, yang sebenarnya berada di atas Tanah Kebun Percobaan di Desa Gratitunon (dalam satu sertifikat). Disarankan untuk melakukan koreksi pencatatan pada 3 NUP Jalan Desa tersebut dengan cara dikapitalisasi ke dalam Tanah Kebun Percobaan Kode Barang 2010203003 NUP 3. Reklasifikasi tidak dilakukan dengan rujukan untuk mempermudah pemeliharaan aset berupa jalan desa.
- d. Telah dilakukan penghapusan atas aset Jaringan Instalasi pengolahan sampah organik dan kompos, Kode Barang 5030301002 NUP 1 senilai Rp. 3.540.000 yang masih tercatat dalam SIMAK, padahal sebenarnya aset tersebut sudah tidak ada.
- e. Aset Tak Berwujud NUP 2, Kode Barang 8010101001, Nama Barang Office Home & Student 2016 disarankan agar dilakukan koreksi pencatatan, dikapitalisasi nilainya ke Laptop atau Notebook agar lebih mudah dalam melakukan penghapusan, namun sampai saat ini belum ditindaklanjuti.
- f. Telah dilakukan PSP atas aset Peralatan dan Mesin senilai Rp. 829.584.580.

7. Workshop Pengamanan dan Penyelamatan Barang Milik Negara Lingkup Kementerian Pertanian

Pada tanggal 15 - 17 Mei 2023 telah diselenggarakan Workshop Pengamanan dan Penyelamatan Barang Milik Negara (BMN) lingkup Kementerian Pertanian (Kementan) di The Trans Luxury Hotel Bandung Provinsi Jawa Barat dengan tema Merajut sinergi membangun resiliensi untuk mewujudkan praktik baik pengendalian dalam pengelolaan BMN di lingkup Kementerian Pertanian. Workshop dibuka oleh Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian (Dr. Jan S Maringka. S.H.. M.H. CGCAE). Kegiatan Workshop diikuti peserta sebanyak 247 orang, baik secara offline maupun online, terdiri atas perwakilan seluruh Eselon I dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementan, Inspektur II, III, dan IV, serta auditor Inspektorat I, II, III, IV dan Investigasi.

Kegiatan Workshop dimaksudkan untuk merumuskan pemecahan masalah (solusi) yang efektif terhadap tatakelola BMN lingkup Kementan. Tujuannya untuk pengamanan dan penyelamatan BMN Kementan, mengeliminasi temuan berulang oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terhadap pengelolaan BMN Kementan, penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) BMN Kementan secara efektif, dan penyediaan anggaran pengelolaan BMN/Asset Kementan secara memadai.

Hasil inventarisasi permasalahan BMN pada 3 (tiga) Eselon I mitra Inspektorat IV, yaitu (1) beberapa bangunan, tanah/lahan diokupasi oleh pihak lain, (2) temuan berulang oleh BPK-RI terhadap pengelolaan BMN/Asset yang kurang tertib pada unit kerja lingkup Kementan, (3) Ketersediaan anggaran pengelolaan dan penyelesaian

permasalahan BMN/asset belum memadai/optimal, dan (4) organisasi Pengelola BMN belum terstruktur secara memadai sebagaimana Pengelola Anggaran.

8. Persiapan Penyusunan LK Semester 1

Dengan selesainya pelaksanaan kegiatan Semester 1 TA 2023, PSIPKH telah mempersiapkan dokumen untuk penyusunan LK Semester 1 TA 2023. Namun demikian untuk dapat menyusun LK Semester 1 telah dilakukan rekonsiliasi data realisasi keuangan dengan KPPN pada awal Juli 2023. LK Semester 1 TA 2023 selanjutnya akan diverifikasi oleh Tim Keuangan Sekretariat BSIP, untuk selanjutnya direviu oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Sesuai undangan dari Sekretariat BSIP, kegiatan verifikasi dan reviu LK Semester 1 akan dilaksanakan pada Workshop LK Semester 1 BSIP TA 2023 mulai 10-14 Juli 2023 di Semarang.

KESIMPULAN

1. Realisasi Belanja pada PSIPKH sesuai dengan OmSpan per 30 Juni 2023 mencapai 38,07% atau sebesar Rp 3.811.258.183 dari total pagu Rp 10.011.579.000. Adapun realisasi belanja satker lingkup PSIPKH per 30 Juni 2023 mencapai 56,55%, dengan kinerja realisasi paling tertinggi LPSIRB dengan capaian 57,72%, dan realisasi belanja terendah dicapai oleh BSIP Veteriner sebesar 33,59%.
2. Pada bulan April disampaikan bahwa LPSIRB bermaksud mengusulkan Penetapan Status Penggunaan BMN berupa Peralatan dan Mesin yang tidak memiliki bukti kepemilikan dan digunakan untuk menunjang tuisi, dengan nilai perolehan seluruhnya sebesar Rp 38.500.000 dan mengusulkan permohonan penetapan penghapusan Hibah BMN berupa Sapi Potong sejumlah 88 ekor dengan nilai perolehan sebesar Rp. 219.656.225, dimana telah dilakukan hibah kepada 15 Dinas/Stateholder sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021.
3. Pada bulan Mei 2023 PSIPKH melaksanakan Monitoring BMN pada LPSI Ruminansia Besar Grati, Jawa Barat. Dimana Tanah LPSIRB (Tanah Kebun Percobaan) yang terletak di Desa Gratitunon dan Desa Sumberagung untuk dilakukan pemagaran dalam rangka pengamanan aset dan Tanah LPSIRB NUP 2 disarankan direklasifikasi menjadi Tanah Bangunan Kantor Pemerintah.
4. Pada bulan Mei 2023 telah diselenggarakan Workshop Pengamanan dan Penyelamatan Barang Milik Negara (BMN) lingkup Kementan di The Trans Luxury Hotel Bandung dengan tema Merajut sinergi membangun resiliensi untuk mewujudkan praktik baik pengendalian dalam pengelolaan BMN di lingkup Kementan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk merumuskan pemecahan masalah (solusi) yang efektif terhadap tatakelola BMN lingkup Kementan. Tujuannya untuk pengamanan dan penyelamatan BMN Kementan, mengeliminasi temuan berulang oleh BPK-RI terhadap pengelolaan BMN Kementan, penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) BMN Kementan secara efektif, dan penyediaan anggaran pengelolaan BMN/Asset Kementan secara memadai.
5. Pada bulan Juni telah dilakukan peninjauan kerjasama pemanfaatan aset pada PSIPKH yakni (a) peninjauan penyewaan aset tanah untuk digunakan membangun menara *base transciever station* (BTS) oleh PT Protelindo, dan (b) peninjauan penyewaan bangunan kantin oleh Jaware Cafe.
6. PSIPKH akan menyiapkan LK Semester 1 TA 2023 untuk diverifikasi BSIP dan direviu Itjen Kementan pada Workshop LK Semester 1 yang akan diselenggarakan mulai tanggal 10-14 Juli 2023.